



DOI: <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Peran Politik Perempuan dalam Organisasi Sayap Partai: Studi Kasus Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Wonosobo

Alvina Zahrottul Auliya^{1*}, Supartinah²

¹Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, aza.alvinaaa@gmail.com

²Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, supartinah@unsiq.ac.id

*Corresponding Author: aza.alvinaaa@gmail.com¹

Abstract: *This study, entitled Women's Political Role in the Perempuan Bangsa Organization of the National Awakening Party in Wonosobo Regency, is motivated by the limited research on the effectiveness of political party women's wings in strengthening women's political participation and representation at the local level. The study aims to analyze the mechanisms of women's empowerment, forms of political participation, and women's political roles within the Perempuan Bangsa organization in Wonosobo Regency. This research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that women's empowerment is implemented through political education, cadre development, leadership training, and social and religious activities that enhance members' political capacity. Women's political participation is reflected in their involvement in organizational management, political party activities, and community engagement, although it remains constrained by limited financial resources and uneven member participation. The novelty of this research lies in its analysis of a political party's women's wing as an instrument for strengthening women's empowerment and political representation at the local level. The study concludes that Perempuan Bangsa plays an important role in cadre development, capacity building, and women's political representation; however, substantive representation still requires institutional strengthening and more sustainable organizational programs.*

Keywords: *Women's Political Role, Political Party Women's Wing, Perempuan Bangsa, Political Participation, Political Representation.*

Abstrak: Penelitian berjudul Peran Politik Perempuan dalam Organisasi Sayap Partai Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai efektivitas organisasi sayap partai dalam meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemberdayaan, bentuk partisipasi politik, dan peran politik perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Penelitian

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui pendidikan politik, kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial dan keagamaan yang mampu meningkatkan kapasitas kader. Partisipasi politik diwujudkan melalui keterlibatan dalam kepengurusan organisasi, kegiatan partai, dan aktivitas kemasyarakatan, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum meratanya partisipasi anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis organisasi sayap partai sebagai instrumen pemberdayaan dan representasi politik perempuan pada tingkat lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa Perempuan Bangsa berperan sebagai sarana kaderisasi, penguatan kapasitas, dan representasi politik perempuan, namun representasi substantif masih perlu diperkuat melalui pengembangan kelembagaan dan program organisasi.

Kata Kunci: Peran Politik Perempuan, Organisasi Sayap Partai, Perempuan Bangsa, Partisipasi Politik, Representasi Politik.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara serta menjadi sarana pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Dalam sistem demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan kompetisi elektoral, tetapi juga sebagai media pendidikan politik, kaderisasi, artikulasi kepentingan masyarakat, serta penguatan partisipasi politik warga negara (Budiardjo, 2008). Salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam proses kaderisasi partai adalah perempuan, mengingat keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan baik secara struktural maupun kultural.

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, realisasi keterwakilan perempuan dalam lembaga politik belum sepenuhnya memenuhi harapan. Data menunjukkan bahwa proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat meningkat secara bertahap hingga mencapai 21,9 persen pada periode 2024–2029, namun angka tersebut masih berada di bawah target afirmasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas politik maupun kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik.

Rendahnya partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya patriarki, stereotipe gender, sistem rekrutmen politik yang belum sepenuhnya responsif gender, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, jaringan politik, dan sumber daya organisasi (Putri & Holilah, 2024; Klerista & Subandi, 2025). Akibatnya, perempuan masih lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap pemenuhan kuota dibandingkan sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam politik belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas representasi politik perempuan secara substantif.

Dalam konteks tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun sistem kaderisasi dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai mekanisme organisasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan organisasi sayap perempuan yang berfungsi sebagai media pendidikan politik, kaderisasi, penguatan kapasitas

kepemimpinan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik. Organisasi sayap partai diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran politik yang dapat mempersiapkan perempuan untuk berperan aktif dalam struktur partai maupun lembaga politik.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang memiliki basis sosial kuat, terutama di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama, serta memiliki struktur organisasi hingga tingkat daerah. Sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi politik perempuan, PKB membentuk organisasi sayap perempuan yang bernama Perempuan Bangsa. Organisasi ini memiliki fungsi melakukan kaderisasi, pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta pemberdayaan perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Di Kabupaten Wonosobo, PKB merupakan salah satu partai dengan dukungan politik yang cukup besar pada Pemilu 2024 sehingga organisasi Perempuan Bangsa memiliki posisi yang strategis dalam mendukung proses kaderisasi politik perempuan di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas organisasi sayap perempuan dalam meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya pada implementasi kebijakan afirmasi, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, atau hambatan budaya patriarki terhadap partisipasi politik perempuan. Penelitian mengenai mekanisme pemberdayaan perempuan melalui organisasi sayap partai politik, khususnya pada tingkat daerah, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* mengenai bagaimana organisasi sayap partai menjalankan fungsi kaderisasi, meningkatkan partisipasi politik perempuan, serta membangun representasi politik perempuan secara substantif.

Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis mengenai peran organisasi sayap partai sebagai instrumen pemberdayaan politik perempuan di tingkat lokal dengan mengambil studi kasus Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, penelitian ini menitikberatkan pada proses kaderisasi, pendidikan politik, partisipasi politik, dan representasi politik perempuan yang dibangun melalui organisasi sayap partai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberdayaan perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, mendeskripsikan bentuk partisipasi politik perempuan dalam organisasi tersebut, serta menjelaskan peran organisasi Perempuan Bangsa dalam memperkuat representasi politik perempuan di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai pemberdayaan dan representasi politik perempuan melalui organisasi sayap partai politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran politik perempuan dalam organisasi sayap partai, khususnya Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Wonosobo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interaksi para informan dalam konteks yang alamiah (Sugiyono, 2023). Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu sehingga mampu menggambarkan dinamika peran politik perempuan secara komprehensif dalam lingkungan organisasi yang nyata (Harahap, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Wonosobo dan organisasi sayap Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek

penelitian. Informan penelitian terdiri atas Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo, anggota aktif Perempuan Bangsa, serta pengurus DPC PKB Kabupaten Wonosobo yang memahami pelaksanaan kaderisasi, pemberdayaan, partisipasi, dan representasi politik perempuan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan mengenai mekanisme pemberdayaan, partisipasi politik, dan peran perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, arsip kegiatan, buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, organisasi sayap partai, dan representasi politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan strategi organisasi dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara melalui dokumen organisasi, foto kegiatan, laporan program kerja, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap seluruh data sehingga diperoleh gambaran mengenai mekanisme pemberdayaan, bentuk partisipasi politik, serta peran politik perempuan dalam organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Wonosobo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme Pemberdayaan Perempuan yang Diterapkan oleh Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo melaksanakan pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi, pengetahuan politik, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Pelaksanaan program mengacu pada kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Jawa Tengah, namun implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan sumber daya di tingkat kabupaten.

Hasil wawancara dengan Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa tidak seluruh program yang terdapat dalam dokumen Musyawarah Wilayah dapat dilaksanakan secara mandiri. Organisasi lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada program yang dianggap sesuai dengan kondisi organisasi, seperti Pendidikan Kader Perempuan (PKP), konsolidasi organisasi, kegiatan sosial, serta kerja sama dengan organisasi perempuan lainnya. Ketua Perempuan Bangsa menyampaikan bahwa:

"Kalau kegiatan kami mengikuti arahan dari pusat maupun wilayah. Salah satunya Pendidikan Kader Perempuan sebagai bagian dari pembinaan kader."

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan tidak hanya dilakukan melalui pendidikan politik, tetapi juga melalui pembagian takjil, kultum Ramadan, anjangsana, serta keterlibatan dalam kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut menjadi media bagi kader perempuan untuk

meningkatkan pengalaman organisasi, memperluas jaringan sosial, serta memperkuat solidaritas antarkader.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonosobo dapat diringkas pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan
Bangsa Kabupaten Wonosobo**

Program Muswil DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah	Implementasi di Kabupaten Wonosobo
Pendidikan politik dan pengkaderan	Dilaksanakan melalui Pendidikan Kader Perempuan (PKP).
Pendidikan kader perempuan	Dilaksanakan sebagai proses pembinaan kader perempuan.
Sekolah kader perempuan	Mengikuti kegiatan sekolah kader yang diselenggarakan oleh DPW atau DPP sesuai agenda yang ditetapkan.
Pelatihan dan peningkatan kapasitas kader	Mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh DPW maupun DPP.
Bakti sosial	Diimplementasikan melalui kegiatan pembagian takjil, kultum Ramadan, dan anjangsana kepada masyarakat.
Konsolidasi organisasi	Mengikuti arahan dan agenda konsolidasi yang diselenggarakan oleh DPP maupun DPW.
Kerja sama organisasi	Berpartisipasi dalam kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Wonosobo serta forum organisasi perempuan lintas partai politik.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas organisasi cenderung meningkat menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Pada periode tersebut Perempuan Bangsa lebih aktif melaksanakan pendidikan politik, konsolidasi kader, serta mendukung berbagai kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Wonosobo.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme pemberdayaan masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan pendanaan organisasi sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ketua Perempuan Bangsa menjelaskan bahwa antusiasme peserta sebenarnya cukup tinggi, namun sering kali dipengaruhi oleh ketersediaan biaya transportasi maupun dukungan anggaran kegiatan.

Partisipasi Politik Perempuan dalam Organisasi Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan diwujudkan melalui keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kegiatan internal meliputi rapat koordinasi, Pendidikan Kader Perempuan, pembagian takjil, kultum Ramadan, dan anjangsana. Sementara itu, kegiatan eksternal dilakukan melalui partisipasi dalam forum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Wonosobo dan kegiatan organisasi perempuan lintas partai.

Berdasarkan hasil wawancara, anggota Perempuan Bangsa menilai bahwa kegiatan organisasi tidak hanya memberikan pengetahuan politik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antaranggota. Salah seorang anggota menyampaikan bahwa kegiatan organisasi memberikan manfaat berupa bertambahnya relasi, pengalaman berorganisasi, serta meningkatnya rasa kekeluargaan di antara anggota.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Seluruh pengurus diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan bersama. Namun demikian, penyampaian pendapat dalam forum masih didominasi oleh pengurus inti yang telah memiliki pengalaman organisasi.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa Perempuan Bangsa telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi kepengurusan organisasi. Meskipun demikian, peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam politik elektoral masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kader perempuan PKB Kabupaten Wonosobo yang berhasil memperoleh kursi DPRD pada Pemilu Tahun 2024.

Peran Perempuan Bangsa dalam Politik Elektoral Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap resmi Partai Kebangkitan Bangsa yang berfungsi sebagai wadah kaderisasi dan pemberdayaan perempuan. Keberadaan organisasi ini memperoleh legitimasi secara struktural melalui kepengurusan yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga kabupaten.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antara Perempuan Bangsa dengan PKB bersifat koordinatif. Organisasi menjalankan berbagai program pembinaan kader perempuan sekaligus mendukung kegiatan kepartaian, terutama menjelang pemilihan umum. Penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh struktur kepengurusan Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diisi oleh perempuan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh pengalaman kepemimpinan, memperluas jejaring organisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi politik.

Di samping itu, hasil penelitian menemukan bahwa organisasi lebih banyak menjalankan kegiatan pemberdayaan internal berupa pendidikan politik, kaderisasi, kegiatan sosial, serta pembinaan organisasi. Sementara itu, aktivitas advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan, seperti perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender, belum menjadi fokus utama organisasi.

Pembahasan

Mekanisme Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Fungsi Partai Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan perempuan yang diterapkan Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui pendidikan politik, kaderisasi, peningkatan kapasitas organisasi, kegiatan sosial, dan perluasan jejaring organisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan salah satu fungsi utama partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yaitu sebagai sarana pendidikan politik. Melalui Pendidikan Kader Perempuan (PKP), kader memperoleh pemahaman mengenai organisasi, kepemimpinan, dan peran perempuan dalam politik.

Namun demikian, pelaksanaan pemberdayaan belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan pendanaan dan ketergantungan terhadap program yang berasal dari DPP maupun DPW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan ketersediaan sumber daya.

Partisipasi Politik Perempuan dalam Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam kegiatan organisasi, tetapi juga melalui keterlibatan dalam musyawarah, kegiatan sosial, serta proses kaderisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa telah menyediakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik dan organisasi.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi anggota masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kedekatan dengan struktur partai, dan pengalaman organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran politik

yang mandiri, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan agar keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat insidental menjelang pemilu.

Representasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hanna Pitkin

Berdasarkan teori representasi politik Hanna Pitkin, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo telah memenuhi aspek representasi formalistik karena memiliki legitimasi sebagai organisasi sayap resmi Partai Kebangkitan Bangsa dengan struktur organisasi yang jelas. Pada aspek representasi deskriptif, organisasi telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengisi seluruh struktur kepengurusan sehingga perempuan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas organisasi politik.

Selanjutnya, pada aspek representasi simbolik, Perempuan Bangsa dimaknai sebagai simbol keterlibatan perempuan dalam politik melalui berbagai kegiatan kaderisasi, pendidikan politik, dan aktivitas sosial. Namun demikian, eksistensi organisasi di ruang publik masih perlu diperkuat, terutama melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik.

Sementara itu, pada aspek representasi substantif, penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa telah menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik, kaderisasi, dan kegiatan sosial. Akan tetapi, organisasi belum berperan secara optimal dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar Perempuan Bangsa mampu menjalankan fungsi representasi perempuan secara lebih substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Politik Perempuan dalam Organisasi Sayap Partai: Studi Kasus Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui pendidikan kader perempuan, pembinaan organisasi, kegiatan sosial-keagamaan, serta keterlibatan dalam forum organisasi perempuan. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan politik, pengalaman berorganisasi, kemampuan kepemimpinan, dan perluasan jejaring kader perempuan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi keterbatasan pendanaan, ketergantungan terhadap program dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam menyelenggarakan program secara mandiri dan berkelanjutan.

Partisipasi politik perempuan dalam Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi, pendidikan kader, kegiatan sosial, serta proses musyawarah organisasi. Meskipun perempuan telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas organisasi dan memiliki peluang menduduki posisi kepengurusan maupun mengikuti proses rekrutmen politik melalui partai, tingkat partisipasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dukungan keluarga, dan pengalaman organisasi. Selain itu, proses penyampaian pendapat dalam forum organisasi masih didominasi oleh pengurus tertentu sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan belum berlangsung secara merata.

Berdasarkan analisis menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin, Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan representasi formalistik melalui legitimasi sebagai organisasi sayap resmi Partai Kebangkitan Bangsa, representasi deskriptif melalui keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi, serta representasi simbolik sebagai wadah kaderisasi dan partisipasi politik perempuan. Namun, representasi substantif belum terlaksana secara optimal karena organisasi masih lebih berfokus pada kegiatan kaderisasi, pendidikan

politik, dan kegiatan sosial dibandingkan dengan advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan di tingkat lokal. Oleh karena itu, Perempuan Bangsa telah menjalankan fungsi sebagai organisasi sayap partai dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan program agar mampu memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih substantif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat meningkatkan kemandirian organisasi melalui penguatan tata kelola organisasi, penyusunan program kerja yang lebih sistematis, serta pengembangan sumber pendanaan yang berkelanjutan sehingga pelaksanaan program pemberdayaan perempuan tidak hanya bergantung pada arahan maupun dukungan anggaran dari DPP, DPW, atau pihak lain. Selain itu, organisasi diharapkan memperluas program pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan perempuan, serta advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan agar fungsi pemberdayaan dan representasi perempuan dapat terlaksana secara lebih optimal.

Bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memperkuat pembinaan, fasilitasi, dan dukungan sumber daya terhadap Perempuan Bangsa sehingga organisasi sayap perempuan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, serta memperluas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan partai.

Bagi pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun kolaborasi program pemberdayaan perempuan, pendidikan politik, dan pengembangan kepemimpinan perempuan sehingga partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak hanya meningkat dari segi jumlah, tetapi juga kualitas dan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan.

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai organisasi sayap partai politik, khususnya organisasi sayap perempuan, masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas organisasi sayap partai dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dengan menggunakan objek penelitian yang lebih beragam, pendekatan komparatif antarpolitis, atau perspektif teori yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran organisasi sayap perempuan dalam memperkuat representasi politik perempuan di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad Subekti (Ed.). (n.d.). *Jejak langkah PKB Wonosobo* (Bab IX, "Jejak Langkah PKB Wonosobo", hlm. 202–209).
- Amdimas, F., Jendrius, & Maihasni. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Partai Gerindra dan PPP). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4849–4856.
- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis kebijakan partai politik memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (Studi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 306–323. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>
- Batubara, S. M., & Hati, C. (n.d.). Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam meningkatkan kesadaran politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 173–186.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

- DPP Perempuan Bangsa. (2025). *DPP Perempuan Bangsa gelar ta'aruf, bertekad jadi organisasi terbuka*. <https://pkb.id/read/12490/dpp-perempuan-bangsa-gelar-taaruf-bertekad-jadi-organisasi-terbuka/>
- Halawa, K. K., Bahri, R. S., & Indryany, I. A. (2026). Pola rekrutmen politik perempuan dalam partai politik: Studi komparatif Partai Demokrat dan Partai Golkar. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4).
- Humas. (2025). *Peran dan fungsi partai politik*. <https://musirawas.bawaslu.go.id/berita/peran-dan-fungsi-partai-politik>
- Indikator statistik pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2017. (n.d.). Kabupaten Wonosobo dalam angka 2026. (2026). Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. <https://wonosobokab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/af9a52da2dfb07bdb5858ba3/kabupaten-wonosobo-dalam-angka-2026.html>
- Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak budaya patriarki terhadap kaum perempuan dalam aspek politik dan rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 350–357. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016>
- Kurniawan, I., Sulaksono, T. P., Mentari, A., Marsela, & Safitri, A. N. (2025). Peran organisasi sayap partai politik dalam pembinaan generasi muda: Studi kasus AMPG Provinsi Lampung. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 18–26. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5028>
- Maharani, V. K., Rafni, A., Suryanef, & Fatmariza. (2024). Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Padang oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar. *Journal of Civic Education*, 7(2), 94–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v7i2.1057>
- Masnira, A. (2024). Sayap organisasi partai dan upaya pemenuhan calon legislatif perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Party Organizational Sides and Efforts to Fulfill Female Legislative Candidates in the 2024 General Election*, 2, 23–32.
- Muhammad Raihan Nugraha, S. H. (2025). *Tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan--fungsi--hak-dan-kewajiban-partai-politik-lt550a445c6466c/>
- Mulyana, A., Dwiningrum, S. I., & Astuti. (2024). Lenggeng seni tradisional perekat nilai-nilai sosial budaya dan upaya pembelajarannya pada masyarakat Wonosobo. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 400–407.
- Nugroho, R. D., Purnamasari, M. I., Febriana, A., Setiawan, F., & Lestari, R. W. S. (2024). Model komunikasi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) "Sumber Rejeki" terhadap ketahanan pangan keluarga. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 3(2), 127–137.
- Oakley, A. (1972). *Sex, gender and society*. <https://books.google.co.id/books?id=G8fVBgAAQBAJ>
- Partai Kebangkitan Bangsa. (n.d.). https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
- Peran perempuan dalam pemilu dan politik lokal. (2025). Komisi Pemilihan Umum. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8305_peran-perempuan-dalam-pemilu-dan-politik-lokal
- Peta administrasi Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. (2021). <https://neededthing.blogspot.com/2021/05/peta-administrasi-kabupaten-wonosobo.html>
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Putri, B. G. I., & Holilah. (2024). Pemberdayaan perempuan dalam partai politik (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo). *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 90–116. <https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.90-116>
- Putusan MK soal keterwakilan perempuan di AKD sejalan dengan isu kesetaraan gender. (2025). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/kegiatan->

[dpr/berita/Putusan-MK-Soal-Keterwakilan-Perempuan-di-AKD-Sejalan-dengan-Isu-Kesetaraan-Gender-60484](#)

- Rahma Syakira Ayu, A., Dewi, A., Putri, N. F., & Ummah, A. (2025). Analisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar: Studi kasus peran dan strategi organisasi sayap KPPG. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1). Sejarah pendirian PKB. (n.d.). Partai Kebangkitan Bangsa. <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>
- Umagapi, J. L. (2020). Tantangan dan peluang women's representation in the 2019 parliament election. *Jurnal Penelitian Politik*, 19–34.
- Wahyu Herryansyah Putra. (2020). Pola kaderisasi politik melalui sayap partai perempuan (Studi kasus perbandingan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 9, 336–346.
- Women's representation in parliament sees sluggish gains. (2026). United Nations News. <https://news.un.org/en/story/2026/03/1167092>
- Yahukimo. (2025). Memahami kaderisasi dalam organisasi: Fungsi dan tahapannya serta contoh pelaksanaannya. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/9079_memahami-kaderisasi-dalam-organisasi-fungsi-dan-tahapannya-serta-contoh-pelaksanaannya
- Yariza, Z., Matondang, M., & Harahap, A. M. (2026). The position and rights of women in political parties in Indonesia (Case study: Partai Kebangkitan Bangsa of North Sumatra). *Jurnal Social*, 10(1), 416–429. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7407>
- Zahra Nabila Afanin. (2023). Male entitlement bagian stereotipe gender (Analisis semiotika). *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 1(1), 88–109. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1386>